

COMPANY PROFILE

PT KELINCI KARYA SAMPOERNA





PT KELINCI KARYA SAMPOERNA CORPORATE PROFILE

We presented our company profile, PT Kelinci Karya Sampoerna is currently one of the coal trading company in Indonesia. Incorporated in 2012. The company offers supply chains of coal solution in Indonesia and international clients with highly effective, commitment and quality assurance through our professional teamwork.

PT Kelinci Karya Sampoerna is ambitious to strive for a leading coal related energy company in Indonesia with sustainable growth model through adoption of best practices and good corporate governance.

CORPORATE PROFILE



Name : PT KELINCI KARYA SAMPOERNA

Address : Jl. SM Amin No. 8 A / 11, RT.005/RW.001, Kelurahan Simpangbaru,
Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28293

Telephone : +62 21-5155-171

Email : Kelincikaryasampoerna@gmail.com

Business : Coal Trading

NPWP : 03.229.407.6-216.000

NIB : 9120401850819

IUP OPK : 91204018508190001

ET : 03.ET-04.21.0340



PT KELINCI KARYA SAMPOERNA

OUR VISION

- Increase coal production through exploration and Minedevelopment activities
- Aggressive sales strategy.
- Be resilient to take the dynamic global coal market



PT KELINCI KARYA SAMPOERNA

OUR MISSION

- Learning and competency improvement in coal mining company.
- Internal process improvement of human resources aspect.
- Improve public prosperity and welfare of our operating team in and around operation area.
- Protect and preserve the environment surrounding our mines in sustainable manner.

AKTA PERUSAHAAN SK MENKUMHAM NPWP



PT KELINCI KARYA SAMPOERNA LEGALITY

SPPKP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP RIAU
KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN
JL. RING ROAD ARENOKA II (JALAN SIM AMIN), PEKANBARU
TELEPON 076140346, 40306 FAKSIMILE 0761-559955 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KIRING PAJAK (021) 150020
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Nomor:S-654PKP/WPJ.02/KP.0403/2020

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ.2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. KELINCI KARYA SAMPOERNA
2. NPWP : 03.229.407.6-216.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 11 Desember 2020 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Pekanbaru, 11 Desember 2020
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,

Chrisno Masudi Jr.

TDP

01213

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS (PT)

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEORAN TERBATAS

NOMOR TDP 040114012440	BERLAKU S/D TGL 17 MEI 2022	PENDAFTARAN PEMBAHARUAN KE : BARU : 1
NAMA PERUSAHAAN : PT. KELINCI KARYA SAMPOERNA	STATUS : PUSAT	
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB : JOHNSON HARTAWAN		
ALAMAT PERUSAHAAN : JL. SM. AMIN NO. 8A / 11, KEL. SIMPANG BARU, KEC. TAMPAN, KOTA PEKANBARU, RIAU		
NPWP : 03.229.407.6-216.000		
NOMOR TELEPON : 081371840692	FAX : -	
KEGIATAN USAHA POKOK : PERDAGANGAN HASIL PERTAMBANGAN	KBLI : 46610	

PEKANBARU, 09 September 2017
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PEKANBARU
SELAKU
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

ISO 9001:2015

MUHAMMAD JAMIL, M. Ag. M. Si
Pembina Tk. I
NIP.19750603 2001112 1 003

SIUP



Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan kepada:

Nama Perusahaan : PT KELINCI KARYA SAMPOERNA
Nomor Induk Berusaha : 8120312013117
Alamat Perusahaan : JL. SM AMIN NO. 8A/11
Nama KBLI : PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK, PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBID, PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG
Kode KBLI : 46100, 46610, 46900
Barang / Jasa Dagangan Utama : BATU BARA, PERTAMBANGAN BATU BARA, PEMASOK, SUPPLIER, LEVERANSIR,--
Lokasi Usaha
- Alamat : JL. SM. AMIN NO. 8A/11
- Desa/Kelurahan : Simpangbaru
- Kecamatan : Tampuan
- Kabupaten/Kota : Kota Pekanbaru
- Provinsi : Riau

Izin Usaha ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 31 Oktober 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang terstempel dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

PT KELINCI KARYA SAMPOERNA

LEGALITY

IUP OPK



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 91204018508190001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha

2. Nomor Induk Berusaha (NIB)

3. Alamat Kantor

4. Status Penanaman Modal

5. No. Telepon

6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU)

7. Lokasi Usaha

8. Status
- : PT KELINCI KARYA SAMPOERNA

: 9120401850819

: Jl. SM. Amin, Desa/Kelurahan Simpangbaru, Kec. Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kode Pos: 28293

: PMDN

: 081256003900

: 46610 - Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI

: Jl. SM. AMIN No.8A/11, Desa/Kelurahan Tampan, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kode Pos: 28290

: Telah memenuhi persyaratan

Lampiran izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLU Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 29 Agustus 2023

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Bahili Lahadalia

Dicetak tanggal: 29 Agustus 2023



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN : 91204018508190001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLU	Judul KBLU	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari badan usaha pemohon- Salinan Perjanjian/Nota Kesepahaman kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara dengan pemegang: IUP; IPR; SIPB; Izin Pengangkutan dan Penjualan lainnya Yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai sumber komoditas pengangkutan dan penjualan <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLU yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN:91204018508190001

Lampiran berikut ini memuat data teknis Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara Baru, sebagai berikut:

1. Nama Pelaku Usaha
2. Golongan
- : PT KELINCI KARYA SAMPOERNA

: Batubara

Dengan Ketentuan:

1. Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Perizinan Berusaha ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara wajib melakukan pengangkutan dan penjualan Batubara yang berasal dari pemegang:

a. Izin Usaha Pertambangan;

b. Izin Usaha Pertambangan Khusus;

c. Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;

d. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara; dan/atau

e. Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara lainnya,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara wajib memenuhi hak dan kewajiban serta dilarang melanggar larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Batubara dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PT KELINCI KARYA SAMPOERNA LEGALITY

NIB



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120401850819

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : PT KELINCI KARYA SAMPOERNA
2. Alamat Kantor : Jl. SM. Amin, Desa Kelurahan Simpangbaru, Kec. Bitawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kode Pos: 28203
3. Status Penanaman Modal : PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : U11411 (Pertambangan Batu Bara)
5. Skala Usaha : Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendafaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditentukan di Jakarta, tanggal: 1 Agustus 2019
Perubahan ke-2, tanggal: 12 Juli 2022

Mensteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Dilantatangi secara elektronik

Ditakar tanggal: 12 Juli 2022

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini tidak diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



EKSPORTIR TERDAFTAR



DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Atan 111, Jalan Ras No. 5, JAKARTA 10110
Telp. 021-2255555, 2255556, 2255557 dan 2255558, 2255559
Fax. 021-2255551

PENGAKUAN
SEBAGAI EKSPORTIR TERDAFTAR BATUBARA
ET-BATUBARA
NOMOR : 63.ET-04.21.6340

Menurut permohonan PT. KELINCI KARYA SAMPOERNA No. 617465/INATRADE/11/2021 yang diterima tanggal 10 November 2021 dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/PA-DAG/PER/7/2014 Tentang Ketentuan Ekspor Batubara Dan Produk Batubara, kepada:

Nama Perusahaan : PT. KELINCI KARYA SAMPOERNA
Alamat Perusahaan/Fabrik Gudang : Jl. SM AMIN NO. 04/11, KEL. SIMPANGBARU, KEC. TAMPAK, KOTA PEKANBARU, RIAU
Nama Penanggung Jawab Perusahaan : J. SM AMIN NO. 04/11, KEL. SIMPANGBARU, KEC. TAMPAK, KOTA PEKANBARU, RIAU
Nomor Telepon/Fax Perusahaan : 081379261599
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120401850819
Nomor dan Usaha Penanaman Modal : KERTUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 281/UJ/P/PM/2019 TANGGAL 30 OKTOBER 2019
Operasi Produksi/Ruang Pengangkutan dan Penjualan

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor secara tertulis mengenai pelaksanaan ekspor baik realisasi maupun tidak realisasi setiap bulannya paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal diterbitkannya pengakuan sebagai ET-Batubara kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
2. Laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada angka 1 juga disampaikan melalui: <http://intrade.kemendag.go.id>.
3. Wajib melaporkan setiap perubahan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri sebelum-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan tersebut.
4. Berada memberikan data/informasi yang diperlukan, dibuktikan pemeriksaan lapangan (kegiatan usaha/gudang/kantor) apabila diperlukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perdagangan.
5. Menyerahkannya yang berlaku dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/PA-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara, termasuk ketentuan penarikan pembayaran kurun produksi/royalti, wajib di verifikasi atau pemeriksaan teknis oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri dan tetap mengikut sertakan bukti-bukti kepastian yang berlaku.
6. Batubara dan Produk Batubara yang akan ekspor harus berasal dari Ite Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) yang masuk dalam Daftar IUP yang tercatat di Ditjen Minerba dan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama pada saat pengalihan ET-Batubara ini.
7. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pada angka 1 sampai dengan 6 di atas, dapat dikenakan sanksi pencabutan pengakuan sebagai ET-Batubara.
8. Pengakuan sebagai ET-Batubara ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 12 November 2024 yang merupakan tanggal berakhirnya masa berlaku IUP di kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat.
9. Jika ditemukan hasil pemeriksaan perbedaan antara dokumen dan kenyataan di lapangan, maka pengakuan sebagai ET-Batubara dapat dihentikan kembali atau dicabut.
10. Bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang timbul disebabkan oleh perbuatan, tindakan, pelanggaran baik sengaja atau tidak sengaja, dan kesalahan yang dilakukan yang akan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas ekspor Batubara dan Produk Batubara yang dilakukan.



Jakarta, 12 November 2021
a.n. Menteri Perdagangan RI,
Plt. Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri

T T D

Indrasari Widi Wardhana

Sebelum:

1. Menteri Perdagangan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan
5. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian LHK
6. Gubernur Kepulauan Riau
7. Gubernur Kepulauan Riau
8. Gubernur Kepulauan Riau
9. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pelabuhan Muat-Solopet
10. Surveyor Batubara dan Produk Batubara

Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

PROSES PERMOHONAN SAMPAI DENGAN PENERBITAN PERIZINAN / PERSETUJUAN
TIDAK DIKENDALAI BAYAR



SANGGAHAN (DISCLAIMER)

Dokumen ini merupakan dokumen Perusahaan yang bersifat rahasia dan diperuntukan serta dipergunakan hanya untuk kepentingan bisnis Group KKS semata

Dokumen ini tidak untuk didistribusikan ke luar Group KKS baik keseluruhan dokumen maupun sebagian dokumen tanpa persetujuan dari pihak Group KKS yang berwenang

Segala bentuk pelanggaran dan penyalahgunaan dokumen ini akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku



TERIMA KASIH